



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
SUB UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**
3. NHK : **56308**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.446.220.875**

1. Bangunan Seluas 27 m2 di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 108.900.000
2. Bangunan Seluas 41 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 232.095.875
3. Bangunan Seluas 47 m2 di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 578.760.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/203 m2 di TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.237.748.000
5. Tanah Seluas 427 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 103.761.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/86 m2 di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 427.200.000
7. Bangunan Seluas 23 m2 di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 455.950.000
8. Bangunan Seluas 23 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 258.030.000
9. Tanah Seluas 380 m2 di KOTA SEMARANG , WARISAN Rp. 43.776.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 4.000.000**

1. LAINNYA, --- (SEPEDA LIPAT) SEPEDA LIPAT Tahun 0000, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 172.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.372.130.876
F. HARTA LAINNYA	Rp.	236.795.600
Sub Total	Rp.	14.231.147.351
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	14.231.147.351

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.